



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu fenomena sosial yang sedang marak di masyarakat global saat ini adalah Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Fenomena sosial ini mendapat tanggapan, baik pro maupun kontra dari berbagai kalangan masyarakat global. Seperti misalnya Negara Belanda yang mendukung fenomena ini karena sebelumnya negara tersebut telah melegalkan pernikahan sesama jenis. Namun banyak negara dengan paham keagamaan menentang fenomena LGBT yang sedang marak terjadi ini, seperti salah satunya adalah Indonesia.

LGBT di Indonesia setidaknya sudah ada sejak tahun 1960-an, namun fenomena LGBT ini sudah mulai ada sekitar 1960-an yang kemudian berkembang pada 1980 sampai ke 1990, dan meledak pada tahun 2000-an hingga sekarang (Agung, 2016, para 5).

Cikal bakal organisasi dan advokasi LGBT di Indonesia sudah berdiri lama, salah satunya organisasi yang bernama Himpunan Wadam Djakarta (Hiwad), dan Wanita Adam (Wadam), dan pada 1986 berdiri kelompok kerja Lesbian dan Gay Nusantara atau pokja GAYa Nusantara. Organisasi-organisasi tersebut berkedok emansipasi, merujuk emansipasi wanita, dan yang kemudian

juga mendirikan media sebagai publikasi dan wadah komunikasi antar-LGBT (Agung, 2016, para 7).

Dalam membahas LGBT kita tidak bisa lepas dari dua pandangan, yaitu *Esensialism*, dan *Social Constructionism*. Pandangan *esensialism* meyakini bahwa jenis kelamin, orientasi seksual, dan identitas seksual sebagai hal yang bersifat natural sehingga tidak dapat mengalami perubahan, yakni jenis kelamin hanya terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Sementara dalam pandangan *social constructionism*, bukan hanya gender, namun juga seks/jenis kelamin, orientasi seksual maupun identitas gender adalah hasil konstruksi sosial, dan sebagai sebuah konstruksi sosial, seksualitas merupakan sesuatu yang dapat diubah, sehingga jenis kelamin tidak hanya terdiri dari laki-laki dan perempuan namun juga intersex, dan orientasi seksual tidak hanya heteroseksual namun juga homoseksual dan biseksual (Divisi Litbang dan Pendidikan Komnas Perempuan, 2016, para 1)

Belum lama fenomena LGBT kembali muncul di berbagai media massa, terutama ketika muncul kelompok mahasiswa, dan alumni Universitas Indonesia menamai kelompok mereka dengan nama *Support Group and Resource Center On Sexuality Studies* (SGRC). SGRC adalah studi klub yang membahas tentang seksualitas, dan mendukung tentang konsep LGBT. Polemik kemudian muncul dari pihak Universitas Indonesia yang menganggap SGRC bukan bagian resmi dan menggunakan lambang dan logo UI tanpa adanya persetujuan.

Kemudian muncul juga pernyataan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir, yang menyebut kelompok *Support Group and Resources on Sexuality Studies* (SGRC) adalah kedok dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang bisa merusak moral bangsa.

Dengan menggunakan pandangannya sendiri, media massa berlomba mempublikasikan apa yang menurutnya benar dalam memberitakan kasus LGBT. Selain itu, setiap media seharusnya patuh terhadap kode etik jurnalistik yang ada, agar tidak menyajikan berita yang kabur dan dapat menyesatkan khalayak pembacanya.

Media massa dipenuhi oleh kode etik, dan paling awal diadopsi pada 1923, *Canons of Journalism of the American Society of Newspaper Editors*. Banyak pendatang baru di media massa menganut asumsi bahwa jawaban untuk semua problem moral dalam pekerjaan mereka ada di dalam preskripsi kode etik itu, sebuah pandangan yang disebut etika prespektif, yang merupakan sebuah pandangan yang keliru. Meski kode etik bisa membantu, etika bukan soal sederhana (Vivian, 2008, h. 69).

Dengan menganut kode etik jurnalisme sebagaimana yang sudah diatur dalam UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers, bab dua, pasal 5 butir satu yang isinya “pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”. Dengan menganut etika ini, media massa akan lebih objektif dalam mempublikasikan berita yang ditulisnya, sehingga tidak ada

kemiringan terhadap sisi pro maupun kontra terkait isu yang diangkatnya. Tetapi media massa itu bisa lebih bersikap netral menanggapi isu – isu yang ada di masyarakat.

Standar objektivitas berita telah memunculkan banyak diskusi terhadap konten media jurnalistik di bawah beragam topik, terutama dalam kaitannya dengan beberapa bentuk bias yang merupakan kebalikan dari objektivitas. Norma yang berkuasa pada sebagian besar media barat mewajibkan praktik tertentu yang netral, pelaporan peristiwa yang informatif, dan berlawanan dengan pengharapan positif bahwa sebagian besar berita ditemukan sangat tidak layak. Bagaimanapun, objektivitas merupakan gagasan sederhana bahwa berita haruslah laporan yang dapat diandalkan (dan karenanya jujur) mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dunia (McQuail. 2011, h. 96).

Tingkat keobjektivitasan media dinilai sangat penting karena dapat memengaruhi perspektif orang banyak. Tak banyak media massa di Indonesia seiring berjalannya waktu kita mendapati bahwa media satu terlihat subjektif dalam pemberitaannya, karena terkait dengan kepentingan pemilik media atau faktor lain dibelakangnya. Menurut ucapan Altschull (1984) dalam McQuail (2011, h 22) bahwa “Konten media berita selalu mencerminkan kepentingan mereka yang mendanai pers, jawabanya cukup jelas dan juga konsisten dengan prinsip – prinsip lima teori pers bebas dalam versi ‘pasar’-nya”.

Republika dalam melihat fenomena LGBT merupakan media massa yang sering menampilkan tentang isu tersebut di dalam konten pemberitaannya. Dalam

laman online *Republika* (republika.co.id) artikel terkait LGBT ditemukan sebanyak 298 artikel, yang membahas LGBT dari berbagai sudut pandang dalam kurun waktu satu bulan. Salah satu artikel kontroversial dimuat pada halaman utama yang terdapat di surat kabar harian *Republika* edisi 24 Januari 2016 dengan tema besar “LGBT Ancaman Serius”.

Tema besar yang diangkat oleh surat kabar harian *Republika* edisi 24 Januari 2016 di atas, kemudian disanggah oleh kelompok yang menamai diri mereka LGBTIQ. Sanggahan ini kemudian dituliskan dalam sebuah artikel yang dikutip dari laman berita online *rappler* dengan judul “Forum LGBTIQ Somasi *Republika* terkait artikel ‘LGBT Ancaman Serius’”. Di dalam artikel *rappler* ini menjelaskan bahwa *Republika* tidak mewawancarai dan meminta pendapat narasumber dari kelompok LGBTIQ untuk tajuk utama mereka, dan hanya menggunakan sudut pandang media tersebut. (Firdaus, 2016, para 6).

Dalam dunia jurnalistik khususnya bagi media massa, wawancara sangat penting dilakukan untuk memperkuat nilai berita yang terkandung didalamnya. Wawancara juga dinilai menjadi dasar penguat keobjektifitasan dari seorang penulis berita tersebut.

Aturan-aturan ini jelas menunjukkan bahwa keobjektifitasan sangatlah penting dan melanggar prinsip tersebut sangatlah serius. Objektivitas seorang wartawan dapat terlihat dari pemberitaan yang bersifat faktual dan keberimbangan informasi yang dimuatnya. Media akan terlihat kredibilitasnya jika wartawan dan redaksinya bisa bersifat objektif.

Analisis isi kemudian digunakan peneliti untuk menjawab pertanyaan untuk fenomena yang ada. Analisis isi itu sendiri adalah untuk mendeskripsikan dan menjadi indikator pembandingan antara isi media dengan realitas sosial, isi media adalah refleksi dari nilai sosial dan budaya serta system kepercayaan, mengetahui fungsi dan efek media, dapat mengevaluasi media *performance*, dan mengetahui ada tidaknya bias media (Kriyantono, 2012, h. 233).

Dari paparan pre eliminasi studi diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tingkat objektivitas media massa Republika dalam pemberitaannya tentang fenomena LGBT di Indonesia. Peneliti akan mendalami khususnya aspek kefaktualan dan ketidakberpihakan (*impartialitas*) yang berdasar pada teori objektivitas J. Westerstahl.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengamati fenomena yang muncul dalam memberitakan mengenai lesbian, *gay*, biseksual, dan transgender (LGBT), peneliti merumuskan masalah itu ke dalam satu pertanyaan, yakni seberapa besar tingkat objektivitas surat kabar harian *Republika*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar tingkat objektivitas surat kabar harian *Republika* dalam memberitakan terkait fenomena lesbian, *gay*, biseksual, dan transgender (LGBT)

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1.41) Manfaat Akademis

Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah jumlah penelitian komunikasi terkait objektivitas media massa. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan referensi untuk penelitian sejenis berikutnya.

### 1.42) Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi para praktisi media massa. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi surat kabar harian *Republika* agar dapat lebih menerapkan prinsip objektivitas dalam pemberitaanya.

UMN  
UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA